

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERMUKIMAN KUMUH PADA
KAWASAN PARIWISATA DI DESA GILI INDAH KECAMATAN
PEMENANG KABUPATEN LOMBOK UTARA**

Diajukan Sebagai Syarat Menyelesaikan Studi
Pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Jenjang Strata I
Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Mataram



DI SUSUN OLEH

WELLA
417130025

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2023**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SKRIPSI
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERMUKIMAN KUMUH PADA KAWASAN
PARIWISATA DI DESA GILI INDAH KECAMATAN PEMENANG
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Disusun Oleh:

WELLA
417130025

Mataram, 27 Juni 2023

Pembimbing I,


Ardi Yunianto, ST., M.Sc
NIDN. 0818068001

Pembimbing II,


Rasyid Ridha, ST., M.Si
NIDN. 0809089002

Mengetahui,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK

Dekan,


Dr. Aji Syailendra Ubaidillah, ST., M.Sc
NIDN. 0806027101

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERMUKIMAN KUMUH PADA KAWASAN
PARIWISATA DI DESA GILI INDAH KECAMATAN PEMENANG
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

NAMA : WELLA

NIM : 417130025

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada hari, Jum'at 30 Juni 2023

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

1. Penguji I : Ardi Yuniarman, ST., M.Sc
2. Penguji II : Rasyid Ridha, ST., M.Si
3. Penguji III : Agus Kurniawan, S.IP., M.Eng



Mengetahui,

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK**

Dekan,



Dr. Aji Syaileendra Ubaidillah, ST., M.Sc *

NIDN. 0806027101

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : WELLA

NIM : 417130025

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERMUKIMAN KUMUH
PADA KAWASAN PARIWISATA DI DESA GILI INDAH
KECAMATAN PEMENANG KABUPATEN LOMBOK
UTARA

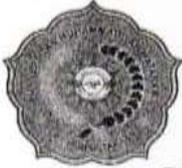
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Faktor-Faktor Penyebab Permukiman Kumuh Pada Kawasan Pariwisata Di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara adalah benar-benar dari karya saya sendiri dengan arahan dari dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II dan bukan merupakan pengambil tulisan atau karya orang lain. Sumber informasi yang digunakan baik dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah dicantumkan dalam daftar pustaka pada skripsi ini.

Apabila pada kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini adalah hasil dari tiruan, maka saya bersedia menerima sanksi atas tindakan tersebut.

Mataram, 15 Juli 2023



WELLA
417130025



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Wella*
 NIM : *417130025*
 Tempat/Tgl Lahir : *Karang Ancak lebar 29-10-1998*
 Program Studi : *perencanaan wilayah dan kota*
 Fakultas : *Teknik*
 No. Hp : *082 340 972 056*
 Email : *wella1785@gmail.com*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

faktor - faktor penyebab permukiman kumuh pada kawasan pariwisata di Desa Gili Indah Kecamatan pemenang kabupaten Lombok utara

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, *10 Juli*2023
 Penulis

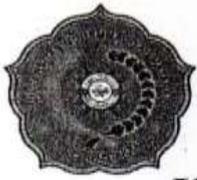


WELLA
 NIM. *417130025*

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Wella*
 NIM : *417130025*
 Tempat/Tgl Lahir : *Karang Ancak lebar 29-10-1998*
 Program Studi : *perencanaan wilayah dan kota*
 Fakultas : *Tenik*
 No. Hp/Email : *082 340 972 056*
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

faktor-faktor penyebab permukiman kumuh pada kawasan pariwisata di Desa Gili Indah Kecamatan penerang kabupaten Lombok Utara.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, *18 Juli* 2023
 Penulis



WELLA
 NIM. *417130025*

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

Bumi itu bulat mau lewat mana dan dengan media apapun asalkan punya tujuan dan alamat jelas, pasti sampai juga. Sama seperti impian yang dicita-citakan, jika punya tujuan yang jelas dan upaya keras, pasti akan terwujud

Jangan lelah mencoba. Tidak ada jaminan kesuksesan, tetapi memilih untuk tidak mencoba adalah jaminan kegagalan

Jangan pernah merasa bersalah untuk menggapai kebahagiaan dan kesuksesan selama diperjuangkan dengan cara yang baik



KATA PENGANTAR

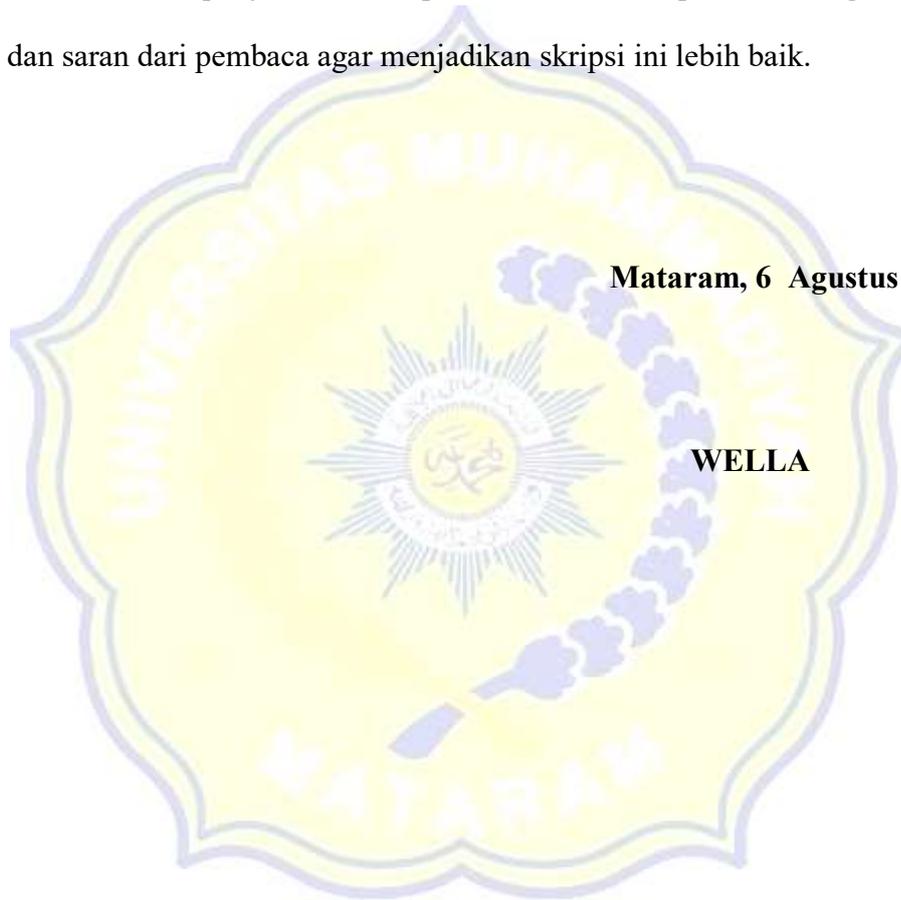
Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERMUKIMAN KUMUH PADA KAWASAN PARIWISATA DI DESA GILI INDAH KECAMATAN PEMENANG KABUPATEN LOMBOK UTARA”**. Shalawat serta salam senantiasa Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Para Sahabatnya, dan Para pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam proses penulisan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, tentunya banyak sekali pihak yang berkontribusi di dalamnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Aji Syailendra Ubaidillah, ST., M.Sc., selaku Dekan Fakultas teknik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Febrita Susanti, ST.,M.Eng.,selaku Ketua Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fkultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Ibu Baiq Harly Widayanti, ST.,MM., Selaku Dosen Pembimbing I dan terimakasih atas segala keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahannya.

5. Bapak Rasyid Ridha, ST.M.Si selaku dosen pembimbing II dan terimakasih atas segala keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahannya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis berupaya semaksimal mungkin agar skripsi ini menjadi sempurna. Namun penulis menyadari banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar menjadikan skripsi ini lebih baik.



ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERMUKIMAN KUMUH PADA KAWASAN PARIWISATA DI DESA GILI INDAH KECAMATAN PEMENANG KABUPATEN LOMBOK UTARA

WELLA
417130025

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Permukiman Kumuh Pada Kawasan Pariwisata Di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, yang menggunakan metode penelitian adalah Metode penelitian pendekatan deskriptif kuantitatif. Dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis penentuan lokasi permukiman kumuh berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh. Adapun hasil penelitian yakni Dusun Gili Air merupakan dusun dengan kepadatan bangunan tertinggi yaitu 12,1 unit/Ha, sedangkan kepadatan terendah adalah Dusun Gili Meno dengan kepadatan bangunan 8,8 unit/Ha. Serta Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman di Desa Gili Indah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, tata bangunan, dan keandalan bangunan dengan persyaratan berdasarkan data permukiman kumuh terdapat 38 unit di Dusun Gili Air, 12 unit di Gili Meno dan 67 Unit Di Gili Trawangan dengan berbagai pertimbangan yakni bangunan yang peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung; arsitektur bangunan gedung; pengendalian dampak lingkungan; rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL); dan pembangunan bangunan gedung di atas dan di bawah tanah, air dan/atau Prasarana/Sarana umum. Untuk kondisi air minum di kawasan permukiman kumuh Desa Gili Indah sebagian besar penduduknya masih menggunakan sumur bor yang di proses menggunakan suling. Dan ada beberapa lingkungan di Dusun Gili Air yang hampir semuanya sudah terlayani oleh PDAM yaitu sekitar 90% dari jumlah KK yang ada.

Kata Kunci : Faktor, Gili Indah, Kawasan Pariwisata, Permukiman Kumuh

ABSTRACT

FACTORS CAUSING SLUM SETTLEMENTS IN THE TOURISM AREA OF GILI INDAH VILLAGE, PEMENANG SUB-DISTRICT, NORTH LOMBOK REGENCY

**WELLA
417130025**

This research aims to determine the factors causing slum settlements in the tourism area of Gili Indah Village, Pemenang Sub-District, North Lombok Regency. The research method used in this study is a quantitative descriptive research approach. The data analysis technique employed in this research utilizes the analysis of determining the location of slum settlements based on the Minister of Public Works and Housing Regulation of the Republic of Indonesia Number 14/PRT/M/2018 on the Prevention and Improvement of Quality of Slum Housing and Settlements. The research findings indicate that Gili Air Hamlet has the highest building density, with 12.1 units/ha, while the lowest density is found in Gili Meno Hamlet, with 8.8 units/ha. Furthermore, the building conditions in the housing and settlements of Gili Indah Village do not meet the technical requirements, building regulations, and building reliability according to the slum settlement data. There are 38 units in Gili Air Hamlet, 12 units in Gili Meno, and 67 units in Gili Trawangan that are considered slum settlements based on various considerations, such as building location and intensity, building architecture, environmental impact control, spatial planning, and above and below-ground building construction, water, and/or public infrastructure/facilities. Regarding the drinking water conditions in the slum settlements area of Gili Indah Village, most residents still use well water processed using distillation. However, several areas in Gili Air Hamlet are almost entirely served by the regional water company (PDAM), accounting for approximately 90% of the total number of households.

Keywords: factors, Gili Indah, tourism area, slum settlements

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

**KEPALA
UPT P3B**



Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
LEMBARAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI	iv
LEMBARAN BEBAS PLAGIARISME SKRIPSI	v
LEMBARAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
LEMBARAN MOTO HIDUP	vii
LEMBARAN KATA PENGANTAR	viii
LEMBARAN ABSTRAK	x
LEMBARAN ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Batasan Masalah.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Terminologi Judul	8
2.2 Tinjauan Teori.....	9

2.2.1	Permukiman	9
2.2.2	Permukiman Kumuh	10
2.2.3	Kawasan Pariwisata	15
2.3	Tinjauan Kebijakan	20
2.4	Penelitian Terdahulu'	24
BAB III METODE PENELITIAN		27
3.1	Lokasi Penelitian	27
3.2	Jenis Penelitian	27
3.3	Variabel Penelitian	27
3.4	Sumber dan Metode Pengumpulan Data Penelitian.....	31
3.5	Teknik Analisis Data.....	33
3.6	Desain Survey	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		62
4.1	Gambaran Umum Desa Gili Indah.....	62
4.2.	Analisis Kawasan Permukiman Kumuh Di Desa Gili Indah	84
4.3.	Analisis Kawasan Pariwisata	109
BAB V PENUTUP.....		114
5.1	Kesimpulan	114
5.2	Saran-saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang sering muncul pada wilayah Negara Indonesia ialah permukiman kumuh yang sering terdapat di kota-kota yang disebabkan oleh jumlah penduduk yang relatif meningkat dari tahun ketahun. Masalah permukiman menjadi salah satu faktor penghambat bagi suatu daerah dimana pertumbuhan penduduk yang tinggi, baik yang disebabkan oleh pertumbuhan secara alami maupun oleh urbanisasi yang tidak terkendali. (Fitri, 2021)

Sesuai dengan amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman mengamanatkan bahwa penyelenggara atas perumahan dan kawasan permukiman termasuk pencegah permukiman kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah daerah atau setiap orang. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang pembangunan nasional yang dituangkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 salah satu sasaran pembangunan lingkungan adalah 0% pengantasan permukiman kumuh perkotaan, dengan program peningkatan kualitas kawasan permukiman yang meliputi 38,34 Ha dan perbaikan swadaya masyarakat dalam 7,683 kelurahan.

Desa Gili Indah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pemenang kabupaten Lombok Utara yang merupakan daerah tujuan wisata yang tergabung dalam tiga gili yaitu Gili Meno, Gili Air, Gili Trawangan. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang memiliki daya tarik keindahan alam pantai dengan air yang jernih dan pasir yang berwarna putih serta keindahan bawah laut yang masih alami menjadikan Desa Gili Indah menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Jika dilihat dalam Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2031 Gili Indah masuk dalam kawasan pariwisata. Kunjungan wisatawan ke tiga wisata di Desa Gili Indah sampai tahun 2023 mencapai 215.332 wisatawan dan didominasi wisatawan mancanegara (wisman). Sektor

pariwisata merupakan salah satu potensi ekonomi kerakyatan yang perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang di lengkapi dengan ketersediaan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait. (Kurniawan 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Lombok Utara perlu memperhatikan ketersediaan fasilitas yang mendukung aktifitas pariwisata tiga gili.

Dengan kawasan peruntukan pariwisata di Desa Gili Indah keberadaan permukiman kumuh tentu menimbulkan dampak negatif bagi citra wisata itu sendiri. Salah satu prinsip dasar pengembangan pariwisata harus di dukung oleh kelangsungan ekologi yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus menjamin terciptanya pemeliharaan sumber daya alam sehingga menjadi daya tarik pariwisata, seperti lingkungan laut, hutan, pantai, danau dan sungai (Anindita, 2015). Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Utara No. 155/53-1/DLH-PKP/2021 penepatan lokasi kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Lombok Utara tahun 2021 sebanyak 5 kecamatan yang salah satunya adalah Kecamatan Pemenang Desa Gili Indah yang dimana luas permukiman kumuh paling tinggi dengan luas kumuh 113,76 Ha. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Di Kabuapten Lombok Utara Tahun 2021

No	Kecamatan	Desa	Luas Kumuh (Ha)
1	Pemenang	Menggala	7.18
		Malaka	13.53
		Pemenang Barat	33.21
		Pemenang Timur	36.26
		Gili Indah	113.76
2	Tanjung	Sigar	12.78
		Jenggala	17.22
		Medana	5.57
		Sokong	13.79
		Samaguna	4.60
		Tegal Maja	6.02
		Tanjung	50.33
3	Gangga	Gondang	47.93
		Segara Katon	23.73

		Rempek	16.58
		Sambik Bangkol	12.52
4	Kayangan	Kayangan	39.13
		Pendua	9.05
		Santong	45.20
		Dangiang	17.41
		Gumantar	8.27
		Selengan	7.01
		5	Bayan
Anyar	7.01		
Loloan	9.17		
Karang Bajo	36.68		
Senaru	13.94		
Andalan	3.84		
Total			632.80

Sumber: Surat Keputusan Bupati Lombok Utara No. 155/53-1/DLH-PKP/2021 penepatan lokasi kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Lombok Utara tahun 2021

Keberadaan permukiman kumuh di Desa Gili Indah yang dimana luas permukiman kumuh paling tinggi di bandingkan dengan desa-desa lain dengan luas kumuh 113,76 Ha, hal ini akan berdampak besar terhadap kondisi dan perkembangan suatu perkotaan atau pedesaan serta kemunduran kualitas lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya ditimbulkan dari adanya permukiman kumuh. Jika pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan mengakibatkan timbulnya permukiman yang kurang layak huni baik di daerah pusat maupun pinggiran kota. (Muvidayanti 2019), akan tetapi jika dilihat berdasarkan data Profil Desa Gili Indah, jumlah penduduk di wilayah ini setiap tahunnya mengalami penurunan dan kenaikan yang tidak stabil, hal ini berbanding terbalik dengan teori (Fitri, 2021) yang menegemukakan bahwa salah satu factor penyebab permukiman kumuh yakni dengan bertambahnya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel jumlah penduduk Desa Gili Indah dari tahun 2017 sampai 2021.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa Gili Indah Tahun 2017 - 2021

No	Tahun	Jumlah Penduduk		Total	Luas Wilayah
		Laki-laki	Perempuan		
1	2017	3.200	2.761	5.961	678 Ha
2	2018	3.530	2.896	6.426	
3	2019	3.503	3.031	6.534	
4	2020	3.660	3.169	6.829	
5	2021	2.388	2.051	4.439	

Sumber: Profil Desa Gili Indah Tahun 2017-2021

Berdasarkan pada tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 jumlah penduduk di Desa Gili Indah sebanyak 5.961 jiwa, sedangkan pada tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 6.829 jiwa, akan tetapi pada tahun 2021 jumlah penduduk di Desa Gili indah mengalami penurunan sebanyak 2.390 jiwa dengan jumlah penduduk sebanyak 4.439 jiwa. Berdasarkan berbagai permasalahan permukiman kumuh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Utara No. 155/53-1/DLH-PKP/2021 yang menetapkan Desa Gili Indah sebagai salah satu desa yang tingkat kumuh paling tertinggi tersebut, mendorong peneliti untuk malakukan penelitian faktor-faktor apa aja yang menyebabkan tingginya luasnya permukiman kumuh di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang, maka masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah Faktor-Faktor Penyebab Permukiman Kumuh Pada Kawasan Pariwisata Di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara?

1.3 Tujuan

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, menguji dan mengembangkan suatu pengetahuan. Demikian pula dengan penelitian yang akan penulis teliti memiliki tujuan khusus. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Permukiman Kumuh Pada Kawasan Pariwisata Di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebgaimana berikut:

1. Bagi Pemerintah

Di harapkan dengan adanya penelitian ini dapat di jadikan masukan pertimbangan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang berguna dalam mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan permukiman kumuh di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.

2. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini di harapkan mampu memberikan wawasan tambahan dalam bidang ekonomi terkait dengan pengembangan pariwisata alam, wisata pantai guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan permukiman kumuh di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. ini di harapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para peneliti peneliti selanjutnya dengan permasalahan yang serupa, dan mampu meningkatkan kualitas penelitian yang akan datang, sehingga dapat menjadi lebih baik dan juga bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

1.5 Batasan Masalah

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Batasan Lokasi

Batas lokasi penelitian yakni di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. Dengan memiliki luas wilayah sebesar 678 Ha. Secara administratif, kawasan ini dibatasi oleh:

- Sebelah Barat : Selat Lombok
- Sebelah Selatan : Desa Pemenang Barat dan Timur
- Sebelah Timur : Laut Jawa dan Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung
- Sebelah Utara : Laut Jawa

1.5.2 Batasan Materi

Materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan nya permukiman kumuh di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam laporan penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan permukiman kumuh di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.

- **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, perumusan masalah, batasan masalah dalam penelitian ini, tujuan penelitian serta sistematika penulisan.

- **BAB II LANDASAN TEORI/TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai terminologi judul, maupun teori-teori yang berisi tentang kajian teoritis yang mendukung penelitian, hal-hal yang terkait faktor-faktor yang menyebabkan nya permukiman kumuh di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara

- **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, lingkup penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Terminologi Judul

Judul penelitian ini adalah “faktor-faktor yang menyebabkan permukiman kumuh di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara”. Judul penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Faktor-faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. (Muvidayanti 2019)
- Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, sertamempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. (Rindarjono, 2017)
- Kumuh mencakup berbagai permasalahan-permasalahan seperti permukiman yang illegal, ketidakterediaan pelayanan infrastruktur dasar sehingga tidak menunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat (Muchadenyiks, 2018).
- Pariwisata merupakan kegiatan berwisata yang di dukung oleh masyarakat dengan berbagai penyediaan pendukung pariwisata yang menunjang kegiatan berwisata baik dari pihak pemerintah, pengusaha maupun masyarakat. Pembangunan kepariwisataan di lakukan melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. (John O. Simond, 2018).

Dari beberapa pengertian di atas untuk itu dapat di simpulkan bahwa judul penelitian “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Permukiman Kumuh Di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara” merupakan penelitian yang dilakukan untuk melihat factor-faktor apa yang Yang Menyebabkan nya Permukiman Kumuh Di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Permukiman

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman adalah bagian dari lingkungan perumahan yang mencakup lebih dari satu unit hunian dan dilengkapi dengan infrastruktur, fasilitas, dan utilitas publik, serta kegiatan fungsional lain yang mendukungnya, dan dapat ditemukan di perkotaan atau pedesaan. Menurut Rindarjono (2017), permukiman adalah pengelompokan satuan tempat tinggal atau rumah manusia yang didalamnya terdapat infrastruktur seperti pembangunan rumah dan jalan, serta fasilitas lain yang digunakan sebagai sarana penyediaan jasa manusia.

Sedangkan (Yunus, 2017) Permukiman adalah suatu bentuk artificial maupun natural dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok, untuk bertempat tinggal baik sementara maupun menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya. Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman terdapat pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Rumah adalah suatu bangunan yang dapat berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, serta sebagai sarana pengembangan keluarga, sebagai cerminan harkat dan martabat orang yang bertempat tinggal di sana, dan sebagai aset bagi pemiliknya.
- Sebagai konsekuensi dari upaya penyediaan rumah layak huni, perumahan terdiri dari kumpulan bangunan yang termasuk komponen permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan. Tempat tinggal ini dilengkapi dengan infrastruktur, layanan, dan utilitas publik. Yang dimaksud dengan permukiman adalah kawasan pemukiman baik di perkotaan maupun di pedesaan yang terdiri dari lebih dari satu unit hunian dan memiliki infrastruktur, layanan, dan utilitas publik. Permukiman juga memberikan dukungan untuk jenis kegiatan fungsional lainnya.

- Ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan yang tinggi, dan buruknya kualitas struktur serta pelayanan dan infrastruktur yang tidak memenuhi kriteria mendefinisikan permukiman kumuh sebagai komunitas yang tidak layak huni. Permukiman kumuh juga cenderung memiliki kepadatan penduduk yang tinggi.

2.2.2 Permukiman Kumuh

Permukiman Kumuh merupakan salah satu masalah sosial yang sulit dipecahkan yang kini dihadapi Indonesia. Meskipun berbagai inisiatif dan program telah dilaksanakan dalam upaya untuk menghilangkannya, kita masih dihadapkan pada banyaknya permukiman kumuh di hampir setiap bagian kota. Pemukiman ini disertai dengan kekacauan dalam kehidupan sosial di wilayah metropolitan. Definisi, serta faktor-faktor yang menyebabkan perkembangannya, dibahas dalam paragraf berikut.

Permukiman adalah ruang tempat berlangsungnya keberadaan manusia, tidak hanya dari segi fisik dan teknisnya, tetapi juga dari segi sosial, ekonomi, dan budaya serta masyarakat yang tinggal di dalamnya. Bukan hanya dari segi jumlah, tapi juga kualitasnya. Menurut Eko Budiharjo (2018), masalah ini tidak hanya menyangkut tempat tinggal tetapi juga pusat pekerjaan, ritel, dan rekreasi. Perumahan beserta segala isi dan kegiatannya merupakan permukiman. Hal ini menunjukkan bahwa permukiman memiliki arti yang lebih luas dari perumahan yang hanya merupakan wadah fisik. Sebaliknya, permukiman merupakan perpaduan wadah (alam, lingkungan, dan jaringan) dan isinya (orang-orang yang hidup bermasyarakat dan berbudaya di dalamnya). Perumahan hanyalah wadah fisik.

Perumahan Kumuh adalah lingkungan tempat tinggal atau tempat tinggal/rumah dan sekitarnya, yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga, tetapi tidak layak huni dari segi kepadatan penduduk, sarana dan prasarana, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas sosial dan infrastruktur. Perumahan kumuh juga bisa disebut sebagai budaya komunal. (Ravianto, 2019).

Pengertian permukiman kumuh oleh (Hetty Adriasih, 2014) adalah lingkungan perumahan yang kondisi tempat tinggal atau tempat tinggalnya saling berdempetan, luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni, rumah berfungsi sebagai tempat istirahat dan melindungi diri dari panas, dingin, dan hujan, lingkungan dan pemukiman penataan tidak teratur, bangunan sementara, berantakan tanpa perencanaan, kurangnya infrastruktur (MCK, air bersih, limbah, listrik, gang, lingkungan kotor dan penyakit), dan kurangnya fasilitas sosial.

Kawasan permukiman yang mengalami penurunan kualitas atau mengalami kemunduran fisik, sosial ekonomi, dan sosial budaya disebut sebagai permukiman kumuh. Hal ini mempersulit masyarakat yang tinggal di daerah kumuh untuk menjalani kehidupan sehari-hari. (Sukari, 2019) Sangat mungkin untuk menegaskan bahwa penghuninya sekarang hidup dalam lingkungan yang menimbulkan ancaman signifikan bagi kehidupan. Secara umum permukiman kumuh ditandai dengan tingkat kepadatan penduduk, hunian, bangunan yang sangat tinggi, kualitas rumah yang sangat rendah, kondisi infrastruktur fisik dan sosial yang tidak memadai seperti air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, sarana pendidikan, ruang terbuka, rekreasi, sosial, atau fasilitas pelayanan kesehatan, perbelanjaan, dan sebagainya. Selain itu dicirikan oleh rendahnya tingkat pendapatan warganya, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, rendahnya tingkat privasi keluarga, dan rendahnya tingkat kohesi masyarakat sebagai akibat dari berbagai norma sosial budaya yang dianut.

2.2.2.1 Karakteristik Permukiman Kumuh

Menurut (Siswono Yudohusodo, 2019) permukiman kumuh merupakan lingkungan perumahan yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Keadaan fisik lingkungan yang tidak memenuhi standar teknis dan kesehatan, termasuk tidak adanya atau tidak tersedianya prasarana, sarana, dan fasilitas lingkungan. B. Kondisi fisik lingkungan yang

tidak memenuhi kriteria teknologi dan kesehatan. Kalaupun ada, kondisinya sangat memprihatinkan, apalagi tata letak bangunannya tidak tertata;

2. Kondisi bangunan sangat memprihatinkan, dan bahan bangunan yang digunakan hanya semi permanen;
3. Kepadatan bangunan dengan KDB lebih besar dari yang diizinkan, dengan kepadatan penduduk sangat tinggi (lebih dari 500 orang per ha); dan fungsi kota bercampur dan tidak teratur.
4. Berikut beberapa ciri masyarakat kumuh, seperti yang dijelaskan oleh Oktaviansyah (2018):
 - a. Fasilitas umum dalam keadaan yang dianggap buruk atau tidak memadai
 - b. Kondisi kehidupan tempat tinggal dan permukiman, serta pemanfaatan kawasannya, mencerminkan status sosial ekonomi penduduk yang rendah.
 - c. Pemanfaatan ruang yang ada di permukiman kumuh dicirikan oleh tingkat kepadatan frekuensi dan volume yang tinggi, yang merupakan cerminan dari anarki spasial dan ketidakberdayaan ekonomi masyarakat yang tinggal di sana.
 - d. Permukiman kumuh adalah kesatuan masyarakat yang hidup terpisah satu sama lain dengan batas budaya dan sosial yang kuat; dengan kata lain, permukiman kumuh diekspresikan sebagai bentuk fisik yang berbeda:
 - Permukiman liar yang terdiri dari satu komunitas dan didefinisikan demikian karena terletak di atas tanah milik negara
 - Satu kesatuan masyarakat yang merupakan komponen RT atau RW
 - Satu kesatuan masyarakat yang berbentuk RT atau RW atau bahkan sebagai kelurahan dan bukan rumah liar.

5. Orang yang tinggal di permukiman kumuh tidak termasuk dalam satu kelompok sosial atau ekonomi; sebaliknya, mereka datang dari berbagai tempat yang berbeda dan memiliki sarana pendukung yang berbeda-beda, selain tingkat kepadatan penduduk yang berbeda. Dalam masyarakat permukiman kumuh, sudah menjadi rahasia umum juga bahwa terdapat stratifikasi sosial berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi dan
6. Mayoritas orang yang tinggal di daerah kumuh bekerja di ekonomi informal atau memiliki mata pencaharian tambahan yang berasal dari ekonomi informal.

Cirri-ciri kekumuhan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman adalah :

1. Tata letak bangunan yang tidak menentu dan kepadatan penduduk yang tinggi
2. Prasarana, sarana, dan utilitas umum belum lengkap;
3. Penurunan kualitas hunian, perumahan, dan permukiman secara keseluruhan, selain prasarana, sarana, dan utilitas umum;
4. Pembangunan tempat tinggal, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

2.2.2.2 Penyebab Utama Timbulnya Permukiman Kumuh

Faktor yang berpengaruh dalam turunnya kualitas permukiman adalah tingkat perkembangan ekonomi masyarakat masih cukup rendah; lingkungan fisik, biologis, sosial, dan budaya setempat belum mendukung; tingkat kemajuan teknologi dalam pembangunan perumahan masih cukup tertinggal; selain itu, kebijakan pemerintah terkait tata guna lahan dan program pembangunan perumahan untuk rakyat masih kurang konsisten (Keman, 2015).

Menurut Santasa (2018), Ada elemen langsung dan tidak langsung yang berkontribusi terhadap pertumbuhan permukiman kumuh. Permukiman kumuh sebagian besar muncul karena masalah fisik, seperti perumahan yang tidak layak dan kurangnya kebersihan lingkungan. Contoh faktor lingkungan yang

berkontribusi terhadap tumbuhnya permukiman kumuh antara lain kualitas rumah, kepemilikan lahan, kepadatan bangunan, dan koefisien dasar bangunan (KDB). Tantangan sanitasi lingkungan mungkin menantang di bidang kualitas air bersih, toilet bersih, pengelolaan limbah, pembuangan air limbah rumah, sistem drainase, dan jalan raya. Kekumuhan disebabkan oleh kombinasi faktor penyebab langsung dan faktor tidak langsung, yaitu variabel yang tidak langsung berhubungan dengan kekumuhan tetapi berpengaruh terhadap faktor lain yang diketahui menyebabkan kekumuhan. Variabel langsung adalah mereka yang memiliki hubungan kausal yang terbukti dengan lingkungan miskin perkotaan. Permukiman kumuh dianggap secara tidak langsung dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ekonomi, sosial, dan norma dan nilai budaya masyarakat.

2.2.2.3 Kriteria Penilaian Kawasan Kumuh

Tingkat kekumuhan suatu lingkungan permukiman dapat diukur dari terdapat beberapa derajat permukiman kumuh yang masing-masing memiliki peran kunci dan berdampak besar terhadap keberadaan permukiman kumuh di suatu kawasan permukiman. Kriteria berikut dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan derajat permukiman kumuh, meskipun perubahan juga dapat dilakukan pada setiap situasi. Kriteria ini dimaksudkan untuk melayani hanya sebagai referensi. (Kamal, 2005). Kriteria dalam penentuan tingkat kekumuhan antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 kriteria tingkat kekumuhan

No	Parameter	Sub kriteria
1	Kondisi bangunan gedung	Disorganisasi dalam bangunan
		Kepadatan bangunan
		Tidak memenuhi spesifikasi kebutuhan teknis bangunan
		Perlindungan lingkungan melalui cakupan layanan jalan

2	Kondisi jalan lingkungan	Kondisi lingkungan permukaan jalan
		Tersedianya akses air minum yang bebas dari pencemaran
3	Kondisi penyediaan air minum	Air minum tidak memuaskan
		Ketidakmampuan mengalirkan air yang mengalir Kurangnya drainase
4	Kondisi drainase lingkungan	Pipa di bawah standar.
		Peraturan Bangunan untuk Sistem Drainase
		Fasilitas pengolahan air limbah tidak memenuhi standar teknis yang diperlukan.
		Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang ada belum memenuhi standar teknis yang harus dipenuhi.
5	Kondisi pengelolaan air limbah	Infrastruktur pengelolaan sampah yang ada saat ini belum memadai.
		Bangunan dan infrastruktur yang tidak terawat.
6	Kondisi pengelolaan persampahan	Tindakan pencegahan dan keselamatan kebakaran yang buruk Fasilitas keselamatan dan perlindungan kebakaran yang buruk
		Kekacauan di tempat kerja. Kepadatan Konstruksi
7	Kondisi proteksi kebakaran	Tidak memenuhi persyaratan dan standar teknis bangunan.
		Cakupan pelayanan jalan untuk perlindungan lingkungan

Sumber Permen PU No. 14 Tahun 2018

Tabel 2.2 Indikator Penilaian Tingkat Kekeumuhan

No	Klasifikasi Kumuh	Skor	Rentang Nilai
1	Bukan kawasan kumuh	0	0-25%
2	Kawasan kumuh ringan	1	26-50%
3	Kawasan kumuh sedang	3	51-75%
4	Kawasan kumuh berat	5	76-100%

Sumber : hasil tabulasi 2022

2.2.3 Kawasan Pariwisata

Menurut Direktorat Pemanfaatan Alam dan Jasa Lingkungan (2002) Wisata alam merupakan kegiatan perjalanan atau bagian dari kegiatan kerelawanan yang sifatnya hanya sementara untuk menghargai keunikan dan keindahan alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Taman Buru, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi . taman wisata alam dapat juga disebut sebagai taman buru. Menurut Suwantoro (2017), wisata alam adalah jenis kegiatan wisata yang memanfaatkan kemungkinan yang disajikan oleh sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan alam. Kegiatan berupa kecintaan terhadap alam yang dilakukan di tempat tujuan wisata disebut sebagai kegiatan wisata alam. Kegiatan ini dapat mencakup hal-hal seperti rekreasi, wisata pendidikan, penelitian, budaya, dan banyak lagi. Kegiatan yang berkaitan dengan wisata alam tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan sumber daya dan perlindungan lingkungan sekitar.

Kegiatan rekreasi dan wisata yang memanfaatkan potensi alam untuk mengapresiasi keindahan alam, baik dalam keadaan masih perawan maupun hasil usaha budidaya yang ada saat ini disebut wisata alam. Setelah berpartisipasi dalam kegiatan yang sangat sibuk dan karena sifat kota yang padat, orang sering beralih ke wisata alam sebagai cara untuk menyeimbangkan kembali kehidupan mereka (Anonim, 2016). Menurut

(Maulidi, 2015) mengatakan bahwa suatu wisata alam memiliki tujuan, yaitu :

- a. Mempercepat laju ekspansi ekonomi.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. melestarikan alam, lingkungan, dan budaya; dan
- d. Menumbuhkan rasa cinta tanah air sendiri.
- e. Menumbuhkan rasa identitas kebangsaan yang lebih kuat sekaligus memupuk kebersamaan.
- f. Mendorong ikatan persahabatan yang lebih erat antar negara.

Upaya dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah lingkungan alam sekitar. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, diharapkan bahwa kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial tidak mengabaikan kebutuhan untuk melindungi lingkungan. Setiap pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam harus memperhatikan daya dukung ekosistem di sekitarnya.

Menurut Deputy Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kementerian Tentang Lingkungan Dalam Buku Pedoman Daya Dukung dan Akomodasi Lingkungan Hidup disebutkan bahwa daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menopang kegiatan manusia, makhluk hidup lain, dan lingkungan itu sendiri. Dengan kata lain, daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menampung kegiatan lingkungan. keseimbangan yang sehat antara keduanya. Kemampuan suatu lingkungan untuk menopang aktivitas manusia, makhluk hidup lainnya, serta terpeliharanya keseimbangan antara keduanya disebut sebagai daya dukung lingkungan. Secara umum daya dukung lingkungan hidup menyatakan bahwa daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung baik kegiatan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Selain itu, (Anindita, 20154) menggarisbawahi bahwa daya dukung lingkungan mengacu pada jumlah maksimum manusia yang dapat ditampung di suatu wilayah tertentu tanpa mempengaruhi atau bahkan menimbulkan kerusakan pada ekosistem yang berada di wilayah

sekitarnya. . Angka ini disebut sebagai "daya dukung". Konsep daya dukung dapat dipahami dalam bisnis perjalanan dan wisata dengan berbagai cara. World Tourism Organization mendefinisikan daya dukung destinasi wisata sebagai jumlah maksimum orang yang dapat mengunjungi suatu destinasi wisata dalam waktu bersamaan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan fisik, ekonomi, atau sosial budaya destinasi atau mengurangi daya dukung destinasi wisata. tujuan wisata. Jumlah maksimal orang yang dapat mengunjungi suatu tempat wisata dalam waktu yang bersamaan ditentukan oleh jumlah orang yang dapat mengunjungi suatu tempat wisata dalam waktu yang bersamaan. tingkat kepuasan yang diharapkan seseorang dari waktu yang mereka habiskan di tempat itu. Menurut Soemarwoto (2004), istilah “daya dukung” dalam konteks kepariwisataan mengacu pada kemampuan suatu daerah dalam menyambut pengunjung dan dinyatakan sebagai jumlah wisatawan yang dapat ditampung di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. (Soemarwoto, 2004).

Daya dukung wisata sebagai jumlah orang yang mengeksploitasi suatu lokasi pariwisata sedemikian rupa untuk mendapatkan tingkat kesenangan setinggi mungkin sambil memiliki efek negatif yang paling kecil terhadap sumber daya. Istilah "daya dukung" digunakan untuk menggambarkan jumlah terbesar orang yang dapat ditampung di suatu area tertentu tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan alam atau menyebabkan kerusakan padanya, dengan tetap memenuhi persyaratan dan kebutuhan wisatawan. Kapasitas ini disebut sebagai “daya dukung” lingkungan pariwisata. Ada dua aliran pemikiran dalam hal daya dukung, menurut O'Reilly (2016). Yang pertama menunjukkan bahwa kemampuan suatu daerah tujuan untuk menyerap konsekuensi negatif dari kegiatan wisata yang dilihat oleh penduduk lokal adalah apa yang merupakan daya dukung tujuan dalam hal pariwisata. Kedua, ketika daya dukung terlampaui dan akibatnya pengunjung merasa tidak nyaman, mereka akan mencari tempat wisata lain daripada terus tertarik untuk mengunjungi

daerah tersebut. Hal ini dikarenakan wisatawan tidak ingin merasa sesak. Selain itu, menurut Sunaryo, kriteria tersebut di atas dapat dihitung dan dianalisis berdasarkan sejumlah faktor penting yang tercantum di bawah ini:

- a. Jumlah pengunjung yang berkunjung dan jenis wisatawan yang melakukannya;
- b. Durasi rata-rata tinggal wisatawan;
- c. Sifat dan pola perilaku wisatawan; dan
- d. Sifat dan ketahanan lingkungan setempat, dengan mempertimbangkan komponen fisik dan biotik serta sosial ekonomi dan budaya daerah tersebut.

Hal-hal yang mempengaruhi daya dukung menurut (Lime, 2017) dapat di kelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- a. Karakteristik sumberdaya alam seperti geologi dan tanah, topografi, vegetasi, hewan, iklim, dan air.
- b. Karakteristik pengelolaan seperti kebijakan dan metode pengelolaan.
- c. Karakteristik pengunjung seperti psikologi, peralatan, perilaku sosial, dan pola penggunaan

Dalam penciptaan desa wisata, yang mencakup penggabungan komponen wisata yang sudah ada sebelumnya serta keaslian setting desa masyarakat sekitar, menjadi salah satu pertimbangan yang sangat penting. Komponen yang diperlukan untuk penciptaan kota wisata tidak jauh berbeda dengan yang dibutuhkan untuk pariwisata itu sendiri. Suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, baik keaslian itu berasal dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat sehari-hari, arsitektur bangunan dan tata ruang khas desa, maupun kegiatan ekonomi yang sejenis. , menarik, dan berpotensi untuk dikembangkan, dianggap sebagai kawasan perdesaan yang bergerak di bidang desa wisata. banyak aspek pariwisata, termasuk atraksi, penginapan, dan infrastruktur yang

mendukung industri (Putra, 2016). Menurut Gumelar (2020), tidak semua kegiatan wisata yang berlangsung di desa dianggap sebagai desa wisata. Oleh karena itu, agar suatu desa dapat menjadi pusat perhatian wisatawan maka desa tersebut perlu memiliki item-item penting seperti berikut ini:

- a. singularitas, inovasi, dan individualitas; karakteristik
- b. Lokasinya nyaman untuk kawasan alam yang menakjubkan yang berada tepat di sebelahnya.
- c. Berkaitan dengan komunitas budaya atau peradaban yang menjadi daya tarik utama wisatawan dan pelancong
- d. Berpeluang berkembang baik dari komponen infrastruktur dasar maupun fasilitas tambahannya.

Selain itu, menurut (Putra, 2021) Desa Wisata adalah pengembangan suatu kawasan (desa) melalui pemanfaatan aspek-aspek yang telah ada pada masyarakat pembentuk desa yang beroperasi sebagai fitur produk wisata, agar menjadi rangkaian kegiatan wisata yang terhubung dan bertema. Di dalam desa juga mampu mensuplai dan memenuhi sederet kebutuhan untuk berwisata, baik dari segi keindahan lokasi maupun berbagai fasilitas yang tersedia untuk mendukungnya. Berikut ini merupakan komponen Desa Wisata:

- a. Memiliki potensi untuk menarik minat wisatawan terhadap seni dan budaya yang menjadi ciri khas daerah sekitarnya.
- b. Lokasi desa baik termasuk dalam kawasan pengembangan wisata secara keseluruhan atau paling tidak termasuk dalam koridor dan rencana perjalanan paket wisata yang telah ditawarkan.
- c. Ketersediaan profesional manajerial, pelatih, dan pemain di industri pariwisata, seni, dan budaya adalah yang paling penting.
- d. Inisiatif Desa Wisata didukung oleh aksesibilitas dan infrastruktur.
- e. Terjaminnya keamanan, kerapihan, dan ketertiban lingkungan.

Terdapat dua konsep utama dalam komponen desa wisata (Zebua, 2023). Yang pertama adalah penginapan yang ditawarkan kepada

pengunjung agar memiliki tempat menginap selama berada di kawasan tersebut. Biasanya, desa wisata memanfaatkan rumah-rumah warga sekitar maupun ruang-ruang yang dibangun di sekitar desa wisata. Faktor kedua dikenal sebagai daya tarik atau atraksi, dan mengacu pada daya tarik desa wisata berupa kehidupan sehari-hari penduduk lokal ditambah dengan keadaan lingkungan pedesaan yang khas yang memungkinkan pengunjung untuk terlibat aktif dalam acara-acara yang diadakan oleh penduduk setempat. Keunikan dan keaslian desa wisata, letaknya yang berdekatan dengan kondisi alam yang luar biasa, memiliki keunikan budaya yang mampu menarik pengunjung, serta berpotensi untuk dikembangkan baik dari segi sarana dan prasarana merupakan komponen-komponen yang membentuk desa wisata. (Gumelar, 2022). Kekhasan dan keaslian desa wisata merupakan dua aspek yang berkontribusi terhadap komponen desa wisata. Aspek-aspek tersebut dapat diperhatikan selain akomodasi dan atraksi. Prasiasa (2019) menyatakan bahwa komponen desa wisata terdiri dari empat bagian yang berbeda secara total. Partisipasi masyarakat daerah, penetapan standar yang ditetapkan dalam masyarakat, praktik budaya dan kemasyarakatan yang lazim di wilayah tersebut, dan praktik adat adalah empat komponen tersebut. Sebuah desa wisata perlu memiliki potensi wisata, seni dan adat istiadat yang sudah ada di daerah setempat, kawasan desa perlu masuk dalam lingkup kawasan pengembangan wisata atau setidaknya berada dalam jalur perjalanan paket wisata yang telah dijual. , perlu adanya ketersediaan staf pengelola, pelatih dan seniman yang dapat mendukung keberlanjutan desa wisata, dan perlu adanya aksesibilitas yang dapat mendukung program desa wisata dan menjamin keberhasilan pelaksanaannya. (Putra, 2019).

Menciptakan kawasan wisata yang berbasis budaya yang sudah ada di suatu daerah merupakan salah satu hal yang menarik untuk dilakukan. Keunikan budaya masyarakat yang mendiami suatu tempat menjadi pendorong berkembangnya pariwisata di lokasi tersebut, dan kondisi ini menjadi landasan dibangunnya kegiatan tersebut (Hadiwijoyo, 2020):

1. Aksesibilitas baik, agar memudahkan pengunjung untuk berkunjung dengan menggunakan beberapa moda transportasi yang berbeda. Aksesibilitas dalam konteks kepariwisataan mengacu pada fasilitas yang sering dijumpai dalam penggunaan rutin dan memudahkan pengunjung untuk mencapai suatu tujuan atau daya tarik wisata yang terhubung. Petunjuk arah, bandara, terminal, jumlah waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, frekuensi transit ke tempat tujuan wisata, dan gadget lainnya adalah beberapa faktor penting yang terkait dengan fitur aksesibilitas wisata.
2. Memiliki barang yang dapat dikreasikan sebagai objek wisata, seperti yang menarik dan berbentuk alam, seni budaya, legenda, makanan khas daerah, dan sebagainya.
3. Masyarakat dan tokoh desa merangkul desa wisata dan wisatawan yang mengunjungi desa mereka dan memberikan dukungan yang tinggi untuk kedua usaha tersebut.
4. Akan selalu ada kedamaian dan ketenangan di desa.
5. Terdapat persediaan manusia, peralatan telekomunikasi, dan tempat tidur yang memadai.

2.3 Tinjauan Kebijakan

2.3.1 UU No. 1 Tahun 2011

Konsep penanganan permukiman kumuh mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, yaitu melalui kegiatan pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali (Pasal 97 ayat 1):

1. Peremajaan dilakukan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik pada rumah, perumahan, permukiman, dan kawasan permukiman guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.

2. Peremajaan dilakukan untuk menciptakan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan kawasan pemukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
3. Pemugaran dilakukan dalam rangka memperbaiki dan/atau membangun kembali rumah dan permukiman agar layak huni.

Tujuan pemukiman kembali adalah untuk memperbaiki kondisi kehidupan, termasuk kondisi perumahan dan permukiman, guna melindungi penghuni serta masyarakat secara keseluruhan dari potensi ancaman. Manajemen berusaha untuk mempertahankan praktik yang sama dalam menangani perumahan kumuh dan permukiman kumuh untuk menjaga tingkat kualitas perumahan dan permukiman pada level saat ini.

Kebijakan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh tahun 2015 – 2019 oleh kementerian perumahan rakyat Republik Indonesia, berisi bahwa upaya penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dilaksanakan dengan azas:

1. Pemberdayaan setiap kegiatan diarahkan pada proses pemberdayaan, penggalan sumber daya lokal, dan pemberian peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk berperan sebagai pelaku utama (leading actor).
2. Pendekatan tridaya adalah upaya terpadu untuk menata masyarakat sosial, menata lingkungan fisik, dan mengembangkan kegiatan usaha. ;
3. Pendekatan tridaya terdiri dari tiga bagian:

Pendekatan tridaya adalah upaya terpadu untuk menata masyarakat sosial, menata lingkungan fisik, dan mengembangkan kegiatan usaha. Dan ketiga, pertimbangan dan preferensi terhadap komunitas. Berikut adalah daftar komponen yang membentuk proses penanganan permukiman kumuh:

- Pembangunan fisik lingkungan, seperti pembangunan rumah susun murah sewa (rusunawa), perbaikan sistem air dan sanitasi, dan pendaftaran tanah.

- Pendidikan dan menjaga kesehatan seseorang adalah komponen penting dari pertumbuhan sosial.
- Pertumbuhan keuangan dan bisnis, termasuk kursus memulai bisnis dan akses ke pendanaan ventura.
- Pelatihan pengelolaan fasilitas dan pelatihan pemetaan swadaya disertakan sebagai bagian dari pengembangan kapasitas.

Prinsip dasar penanganan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintahan di Tingkat Daerah Pemerintah Daerah berperan sebagai “Komandan” dan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan program-program penanganan permukiman kumuh, sedangkan Pemerintah Pusat bertindak sebagai pendamping daerah dan mengatur keadaan yang mendukung program-program tersebut.
- b. Pentingnya Pelibatan Masyarakat dalam Pencapaian Tujuan Program Pelibatan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dimulai dari tahap perencanaan dan berlanjut hingga tahap pelaksanaan dan pemantauan.
- c. Bekerja Bersama Dan Memperhitungkan Semuanya. Perencanaan terpadu yang melibatkan kerjasama berbagai pemangku kepentingan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan permukiman kumuh yang timbul dari berbagai sektor, baik yang bersifat fisik maupun non fisik
- d. Kesesuaian dengan Infrastruktur Kota Integrasi rencana penanganan permukiman kumuh dengan rencana pembangunan perkotaan; integrasi infrastruktur perkotaan dan kawasan permukiman; integrasi rencana penanganan permukiman kumuh dengan rencana pembangunan perkotaan Memberikan Keamanan Permukiman Hak atas perumahan yang layak adalah salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar; karenanya, penduduk yang tinggal di dan menempati tempat tinggal, baik secara legal maupun ilegal, dilindungi dari penggusuran sewenang-wenang.

2.3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat Formulasi penilaian lokasi permukiman kumuh berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Kriteria dan indikator tersebut mencakup kriteria fisik (infrastruktur permukiman) yang mencakup bangunan gedung, jalan, drainase, air limbah, persampahan, dan air minum, legalitas tanah, dan pertimbangan lain (kondisi sosial dan potensi ekonomi).



2.4 Penelitian Terdahulu

Untuk Mengetahui Variabel Dan Langkah-Langkah Dalam Penelitian Ini, Diperlukan Refrensi Berupa Penelitian Terdahulu Yang Relevan Dengan Penelitian Ini, Berikut Adalah Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1	Dina margaretha asa (2015)	Penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karakter fisik 2. Tingkat kekumuhan permukiman 3. Penanganan yang mampu mengatasi masalah permukiman kumuh 	Deskriptif Kunlitatif	Permukiman kumuh di setiap RW di Kecamatan Panggungrejo dicirikan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, kurangnya akses air bersih yang berkelanjutan dan signifikan, tingkat pendapatan yang tidak dapat diprediksi, perlunya pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan UKM-UKM, dan keberadaan rumah-rumah yang telah didirikan di tepi pantai.
2	Murtanti Jani Rahayu (2017)	Strategi Perencanaan Pembangunan Permukiman Kumuh Kasus Pemukiman Bantaran Sungai Bengawan Solo, Kelurahan Pucangsawit, Surakarta	<ol style="list-style-type: none"> a. aspek lingkungan fisik, b. sosial, dan ekonomi. c. Strategi dalam perencanaan 	Deskriptif kuantitati	Karakteristik fisik bangunan di wilayah studi dianalisis untuk mengetahui tingkat keparahan kondisi kumuh di sana. Menurut temuan studi prospektif partisipatif, lima faktor pendorong yang paling berdampak pada permukiman kumuh yang berada di Desa Panggungrejo adalah variabel tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, kepadatan penduduk, dan kepadatan penduduk.
3	Agustina Rahmawati (2018)	Strategi penanganan permukiman kumuh (studi	<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan, pendapatan dan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas 	Deskriptif kualitatif	Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Untuk memastikan bahwa penyampaian layanan kepada masyarakat tidak terhambat oleh kurangnya infrastruktur, perbaikan

		kasus kawasan kaligawe, semarang	SDM <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan infrastruktur publik, dan pengelolaan kawasan sempadan pantai. 		sarana dan prasarana yang ada, serta pembuatan infrastruktur layanan baru, harus dilaksanakan secepat mungkin. bangunan, tingkat pendapatan dan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan infrastruktur publik, dan pengelolaan wilayah pesisir adalah beberapa masalah yang perlu ditangani.
4	Ade Mesya Resa, Zulfa Saam dan Suardi Tarum (2017)	Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kampung Bandar Kota Pekan Baru	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi pencegahan • Strategi peningkatan kualitas 	<i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i>	Penataan permukiman kumuh Kampung Bandar menggunakan dua teknik, yaitu strategi preventif dan pendekatan peningkatan kualitas. Kedua strategi ini digunakan dalam proses. Membentuk individu yang lebih cakap, menjaga dan mengendalikan keadaan, serta memberdayakan masyarakat merupakan komponen dari rencana pencegahan. Peremajaan, rehabilitasi, dan relokasi adalah tiga komponen yang membentuk rencana peningkatan kualitas.
5	Diana Margaretha Asa (2016)	Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik permukiman • Tingkat kekumuhan • Penanganan permukiman kumuh 	Analisis Pembobotan Dan Analisis Prospektif Partisipatif	Hasil penelitian ini membawa kita pada kesimpulan bahwa Ciri-ciri permukiman adalah terdapat rumah-rumah yang didirikan di tepi pantai, yang dapat membahayakan keselamatan penduduk dan mengganggu kelestarian pantai yang telah ada.

Sumber: Hasil olahan peneliti 2022

BAB III. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. Dengan memiliki luas wilayah sebesar 678 Ha. Desa Gili Indah keberadaan permukiman kumuh tentu menimbulkan dampak negatif bagi citra wisata itu sendiri. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Utara No. 155/53-1/DLH-PKP/2021.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Metode penelitian pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bersifat memaparkan atau menggambarkan suatu hal dengan tujuan untuk menyelidiki keadaan atau kondisi yang terjadi pada obyek atau wilayah penelitian. Pendekatan deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif survey dan wawancara (Perdana and Reventiary 2016). Dimana yang akan dijelaskan mengenai karakteristik dari variabel Kriteria permukiman kumuh mengenai penyebab kawasan permukiman kumuh di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabuapten Lombok Utara.

Pendekatan penelitian kuantitatif merupakan suatu proses penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka sebagai alat analisis. Angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran kemudian diolah dengan menggunakan statistik dan hasilnya berupa kesimpulan deskriptif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang bersifat induktif, ilmiah, dan objektif dimana data yang di peroleh berupa angka atau pernyataan yang dinilai dan dianalisis dengan suatu analisis statistika. (Hidayat 2016)

3.3 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat satu rumusan masalah yang akan diteliti yaitu tentang Faktor-Faktor Penyebab Luas Permukiman Kumuh Di Desa Gili

Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara berikut dapat dilihat jenis-jenis varibel.

Tabel 3.1 Varibel Penelitian

Tujuan	Variabel	Sub variabel	Sub-Sub Variabel	Data yang Dibutuhkan
Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Tigginya Luas Permukiman Kumuh Pada Kawasan Pariwisata Di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara	Kawasan Permukiman Kumuh (Santosa,2018)	Langsung	Kondisi bangunan gedung	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi dari RDTR, seperti pengaturan bentuk, ukuran, posisi, dan tampilan struktur dalam suatu zona; dan/atau
			Kondisi jalan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang tata bangunan dan pengelolaan kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi penataan rukun tetangga, persil, bangunan, elevasi dan elevasi lantai, ide identitas rukun tetangga, konsep orientasi rukun tetangga, dan muka jalan.
			Kondisi penyediaan air minum	<ul style="list-style-type: none"> • kepadatan bangunan tinggi yang tidak memenuhi standar tata ruang; • kualitas konstruksi yang tidak memenuhi kriteria.
			Kondisi drainase lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang lebih tinggi dari kriteria RDTR.
			Kondisi pengelolaan air limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Koefisien Lantai Bangunan (KLB) • Alokasi Lokasi dan Intensitas Bangunan • Arsitektur Bangunan • Pengendalian • Dampak Lingkungan • Rencana Tata Ruang dan Lingkungan (RTBL) • Konstruksi Bangunan Diatas Permukaan Tanah, Air, dan Prasarana/Fasilitas Umum • Konstruksi Bangunan Diatas Permukaan Tanah, Air, dan Prasarana/Fasilitas Umum • Pembangunan Gedung Diatas

				Permukaan Tanah
			Kondisi pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak semua kawasan pemukiman atau desa terlayani oleh jaringan jalan lokal.
			Kondisi proteksi kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi permukaan jalan yang buruk karena lingkungan. Tidak ada akses ke air minum bersih. Setiap orang tidak terpenuhi kebutuhan minimalnya akan air minum. • Sistem drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga terjadi genangan; hal ini tercermin dari data kuantitas drainase yang tersedia.
			Legalitas Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • • Situasi penguasaan lahan di suatu tempat sangat jelas, terlepas dari apakah itu dipegang oleh lokasi itu sendiri atau oleh pihak lain.
			Pertimbangan Lain	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian atau seluruh tempat tidak memiliki status penguasaan tanah yang definitif, baik karena memilikinya sendiri maupun karena dikuasai oleh pihak lain.
		Tidak Langsung	Faktor Ekonomi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Tapak tersebut: • Terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota; • Tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota
			Faktor Sosial Budaya Masyarakat	
	Kawasan Pariwisata	Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Petunjuk arah, • bandara, terminal, • waktu yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan populasi di lokasi lebih dari atau sama dengan 400 orang per hektar. • • Kepadatan populasi di

			dibutuhkan, <ul style="list-style-type: none"> • biaya perjalanan, • frekuensi transportasi menuju lokasi wisata 	lokasi antara 151 dan 200 orang per hektar. <ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan populasi di lokasi kurang dari atau sama dengan 150 orang per hektar. • Situs memiliki potensi sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan atau dilestarikan.
		obyek-obyek menarik	<ul style="list-style-type: none"> • Objek wisata alam, • seni budaya, • legenda, • makanan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi tidak memiliki potensi yang signifikan untuk pengembangan atau pelestarian sosial, ekonomi, atau budaya seperti yang ada sekarang.
		Keamanan	Keamanan di desa tersebut terjamin	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan yang Dihasilkan Masyarakat Desa Gili Inah
		akomodasi	<ul style="list-style-type: none"> • telekomunikasi, • tenaga kerja yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Gili Indah

Sumber: Hasil olahan peneliti 2022

3.4 Sumber dan Metode Pengumpulan Data Penelitian

Data merupakan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan yang di kaitkan dengan tempat dan waktu, yang merupakan dasar suatu perencanaan dan merupakan alat bantu dalam pengambilan keputusan. Teknik-teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Data Primer

Survei Primer dilakukan melalui survey lapangan secara langsung dengan mengamati objek yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun bentuk survey primer yang dilakukan adalah observasi dan wawancara serta membagikan quisioner. Observasi lapangan yaitu dilakukan untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang kondisi eksisting dari objek penelitian. Hal ini dilakukan dengan mengamati secara langsung visual objek yang diletiti untuk mendapatkan hasil dari permasalahan yang

diteliti. Dengan melihat langsung, diharapkan dapat dikenali yang menjadi permasalahan pada wilayah objek yang diteliti, yaitu di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. Serta melihat aktivitas atau berbagai interaksi yang terjadi di lokasi tersebut.

Sedangkan survey primer yang dilakukan selanjutnya adalah melalui metode wawancara yaitu proses tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Dalam wawancara dilakukan untuk memperoleh data dari pihak narasumber yang di wawancara. Wawancara yang dilakukan adalah pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Pihak-pihak yang di wawancarai yaitu pemerintah daerah yang mengetahui tingginya permukiman kumuh pada kawasan pariwisata di desa gili indah kecamatan pemenang kabupaten lombok utara.

3.4.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari sumber lain secara tidak langsung, yang dapat diperoleh melalui dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian baik secara nasional, catatan pendukung, dan literatur, buku perpustakaan, dokumentasi, arsip dan informasi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer, data sekunder diperoleh melalui sumber kedua atau pengumpul data sebelumnya dan peneliti yang bertindak sebagai pengguna data secara tidak langsung, yang dapat diperoleh melalui dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian baik yang bersifat nasional, catatan pendukung, dan literatur, buku perpustakaan, dokumentasi, arsip dan informasi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer. Data tersebut merupakan data pendukung seperti:

Tabel 3.2 Sumber Data

No	Data	Sumber Data
1	Data Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Dinas Permukiman Kabupaten Lombok Utara
2	Rencana tata bangunan dan	Dinas Permukiman Kabupaten Lombok

	lingkungan (RTBL)	Utara
3	Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	Dinas Permukiman Kabupaten Lombok Utara Dan Kantor Desa Gili Indah
4	Koefisiensi Lantai Bangunan (KLB)	Dinas Permukiman Kabupaten Lombok Utara Dan Kantor Desa Gili Indah
5	Data Sarana dan Prasaran Jaringan Jalan	Kantor Desa Gili Indah
6	Data Sarana dan Prasaran Jaringan Air	Kantor Desa Gili Indah
7	Data Sarana dan Prasaran Jaringan Drainase	Kantor Desa Gili Indah
8	Data Sarana dan Prasaran Jaringan Limbah	Kantor Desa Gili Indah
9	Data Sarana dan Prasaran Jaringan Persampahan	Kantor Desa Gili Indah
10	Data Sarana dan Prasaran proteksi kebakaran	Kantor Desa Gili Indah
11	Data Kependudukan	Kantor Desa Gili Indah
12	Data potensi sosial, ekonomi dan budaya	Kantor Desa Gili Indah

Sumber: Hasil olahan peneliti 2022

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam memanfaatkan data yang telah terkumpul maka harus diolah dan di analisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dan kesimpulan. Teknik analisis data untuk uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis penentuan lokasi permukiman kumuh berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh. Dengan formulasi penilaian lokasi sebagai berikut:

Tabel 3.3 Detail Kriteria Fisik Kumuh

NO	KRITERIA KEKUMUHAN	INDIKATOR KEKUMUHAN BERDASARKAN PERMEN PU NO. 14 TAHUN 2018	PENJELASAN TEKNIS	FORMULASI PERHITUNGAN
----	--------------------	---	-------------------	-----------------------

1	Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Tidak memenuhi persyaratan aturan konstruksi RDTR; dan/atau	$\frac{\sum \text{bangunan tidak teratur}}{\sum \text{semua bangunan}} \times 100\%$
		Tingkat Kepadatan Bangunan	Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kode bangunan atau sistem manajemen kualitas lingkungan internal	$\frac{\text{Luas Kawasan} \frac{200}{250} < \text{Unit/Ha}}{100 \text{ Luas Kawasan Kumuh}} \times X$
		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, bangunan, dan keandalan bangunan, sbb 1. Syarat teknis: a. persyaratan b. persyaratan keandalan bangunan gedung.keselamatan bangunan gedung; 2. Syarat tata bangunan: a. peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung; b. arsitektur bangunan gedung; pengendalian dampak lingkungan; rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL); dan e. pembangunan bangunan gedung di atas	$\frac{\sum \text{bangunan tidak sesuai dengan persyaratan teknis (unit)}}{\sum \text{semua bangunan}} \times X$

			<p>dan/atau di bawah tanah,air</p> <p>3. Syarat keandalan bangunan:</p> <p>a. persyaratan keselamatan bangunan gedung;</p> <p>b. persyaratan kesehatan bangunan gedung;</p> <p>c. persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan</p> <p>d. persyaratan kemudahan bangunan gedung.</p>	
2	Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan	Jaringan jalan tidak menghubungkan antara atau bahkan di dalam suatu lingkungan yang terdapat rumah atau permukiman.	$\frac{\text{Panjang jalan ideal (m)} - \text{Panjang jalan existing}}{\text{Panjang jalan ideal (m)}} \times 100\%$
		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Kerusakan telah terjadi pada permukaan jalan di sebagian atau seluruh jalan lingkungan. (ini termasuk celah dan deformasi)	$\frac{\text{Panjang jalan rusak}}{\text{Panjang jalan ideal}} \times 100\%$
3	Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Masyarakat kekurangan akses terhadap air minum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan memenuhi kriteria kualitas.	$\frac{\sum \text{KK tidak terakses air minum aman}}{\sum \text{KK keseluruhan}} \times 100$
		Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum		$\frac{\sum \text{KK tidak terakses air minum cukup}}{\sum \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$

4	Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Dalam situasi perumahan atau permukiman, kebutuhan air minum minimal 60 liter per orang per hari tidak dapat dipenuhi oleh kebutuhan masyarakat akan air minum.	$\frac{\text{Luas kawasan yang terkena genangan (Ha)}}{\text{Luas Kawasan Keseluruhan}} \times 100\%$
		Ketidakterediaan Drainase	Menghasilkan genangan dengan kedalaman lebih dari 12 inci (305 milimeter) selama lebih dari dua jam sekaligus dan berlangsung lebih dari dua kali dalam setahun.	$\frac{\text{Panjang drainase ideal (m)} - \text{Panjang drainase existing (m)}}{\text{Panjang drainase ideal (m)}} \times 100\%$
		Kualitas Konstruksi Drainase	Ada kekurangan ketersediaan untuk saluran tersier serta saluran lokal.	$\frac{\text{Panjang drainase yang buruk (m)}}{\text{Panjang drainase ideal (m)}} \times 100\%$
Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	a. Tidak adanya jamban atau sistem jamban yang tidak terhubung dengan tangki septik untuk salah satu jenis limbah berikut: a. Limbah individu atau perumahan; B. limbah komunal; atau c. limbah terpusat.	$\frac{\text{Jumlah KK dgn sistem air limbah tdk sesuai standar teknis}}{\text{Jumlah KK keseluruhan}} \times 100\%$	
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	a. A. Tidak ada hubungan antara toilet gooseneck dan septic tank; atau b. Tidak ada sistem pengolahan limbah lokal maupun terpusat yang dapat diakses.	$\frac{\text{Jumlah KK dgn sapras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis}}{\text{Jumlah KK keseluruhan}} \times 100\%$	

6	Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	a. Tidak tersedia:	-
		Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	<ul style="list-style-type: none"> a. Tempat sampah dengan pemilahan sampah skala domestik atau rumah tangga; b. Tempat pengumpulan sampah (tps) atau tps 3r (reduce, reuse, recycle) dalam skala lingkungan; c. gerobak sampah dan/atau truk sampah skala lingkungan; dan d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala lingkungan; e. Tempat sampah dengan pemilahan sampah skala domestik atau rumah tangga; 	$\frac{\text{Jumlah KK dgn sapras pengolahan sampah tdk sesuai persyaratan teknis}}{\text{Jumlah KK keseluruhan}} \times 100\%$
7	Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak tersedia: wadah rumah tangga dan sistem penyortiran; b. sistem pengumpulan skala lingkungan; c. sistem transportasi skala lingkungan; d. Sistem pengolahan skala lingkungan. 	$\frac{\text{Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran (unit)}}{\text{Jumlah bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100\%$

		Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya: a. Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) b. Kendaraan pemadam kebakaran c. Mobil tangga sesuai kebutuhan; dan/atau	$\frac{\text{Jumlah Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran (unit)}}{\text{Jumlah bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100\%$
8	Legalitas Lahan	Kejelasan status penguasaan tanah;	a. Kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau b. Kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemanfaat tanah.	-
		Kesesuaian dengan rencana tata ruang	Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK) yang menunjukkan kesesuaian penggunaan lahan dalam rencana tata ruang.	-

	Pertimbangan lain	Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan harus diberikan pada lokasi perumahan atau permukiman berdasarkan: a. fungsi strategis daerah kabupaten atau kota; atau b. tidak adanya fungsi strategis di kawasan kabupaten atau kota	-
		Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada perumahan atau lokasi pemukiman dengan klasifikasi :	-
		Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 (seratus lima puluh) orang/ha;	-

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.

Setelah diketahui nilai numerik dan presentase numerik setiap kriteria diperoleh, selanjutnya dilakukan penilaian skor/pembobotan untuk setiap kriteria kekumuhan. Nilai skor/pembobotan untuk setiap kriteria ditentukan

sesuai besarnya nilai presentase kriteria, setiap kriteria memiliki parameter dan skor seperti pada tabel di bawah ini



Tabel 3.4 Presentase Kriteria Kumuh dengan Skor/Nilainya

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN					
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR yang meliputi pengaturan bentuk, ukuran, letak, dan tampilan bangunan dalam suatu kawasan; dan/atau • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan pengelolaan kualitas lingkungan dalam RTBL yang meliputi penataan blok lingkungan, persil, bangunan gedung, tinggi dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 	1	
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan RDTR dan/atau RTBL telah dilampaui oleh KDB; • Ketentuan RDTR dan/atau RTBL telah dilampaui oleh KLB; dan/atau • 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan 	5	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan 	1	
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis	Kepadatan bangunan yang tinggi di lokasi, khususnya: untuk wilayah metropolitan besar dan	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	5	Wawancara,

	Bangunan	kota besar, lebih dari 250 unit per hektar; untuk kota menengah dan kota kecil, lebih dari 200 unit per hektar.	<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	3	FormatIsian, Dokumen IMB, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	1	
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	• 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	Wawancara, FormatIsian, Peta Lokasi, Observasi
			• 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	
			• 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	
	a. Kualitas Permukaan Jalan Lingkunganyang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	• 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	Wawancara, FormatIsian, Peta Lokasi, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	
			• 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. akses aman	Masyarakat yang berada di kawasan perumahan dan permukiman tidak memiliki akses air minum yang jernih, tidak berbau, dan tidak berasa.	• 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	Wawancara, FormatIsian, Observasi
			• 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	
			• 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	

	b. kebutuhan	Tidak diperlukan minimal 60 liter air minum per orang per hari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di perumahan atau permukiman.	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 	5	Wawancara, FormatIsian, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 	1	
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. drainase lingkungan tidak tersedia	Kurangya ketersediaan saluran tersier dan/atau saluran lokal, serta fakta bahwa saluran-saluran tersebut tidak terhubung dengan saluran-saluran pada hirarki di atasnya mengakibatkan genangan air dan terbentuknya genangan air.	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 	5	Wawancara, FormatIsian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 	1	
	b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Genangan dengan ketinggian lebih dari 30 sentimeter yang berlangsung lebih dari dua jam dan terjadi lebih dari dua kali dalam setahun sebagai akibat ketidakmampuan jaringan drainase lingkungan mengalirkan air limpasan	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 	5	Wawancara, FormatIsian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 	1	

	c. kualitas konstruksi drainase lingkunganburuk	Konstruksi sistem drainase berkualitas rendah baik karena berupa galian dan bukan material pelapis atau penutup, atau karena telah mengalami kerusakan.	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk 	5	Wawancara, FormatIsian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk 	1	
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. sistem pengelolaan nair limbah t	Pengelolaan air limbah di perumahan atau permukiman tidak menggunakan sistem yang dapat diterima. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa jamban dan toilet di lokasi tersebut tidak terhubung dengan septic tank pada tingkat individu/domestik, komunal, atau terpusat.	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 	5	Wawancara, FormatIsian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis • 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 	3	
	b. prasarana	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: <ol style="list-style-type: none"> 1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	5	Wawancara, FormatIsian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	1	
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPA	a. prasarana	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu:	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 	5	

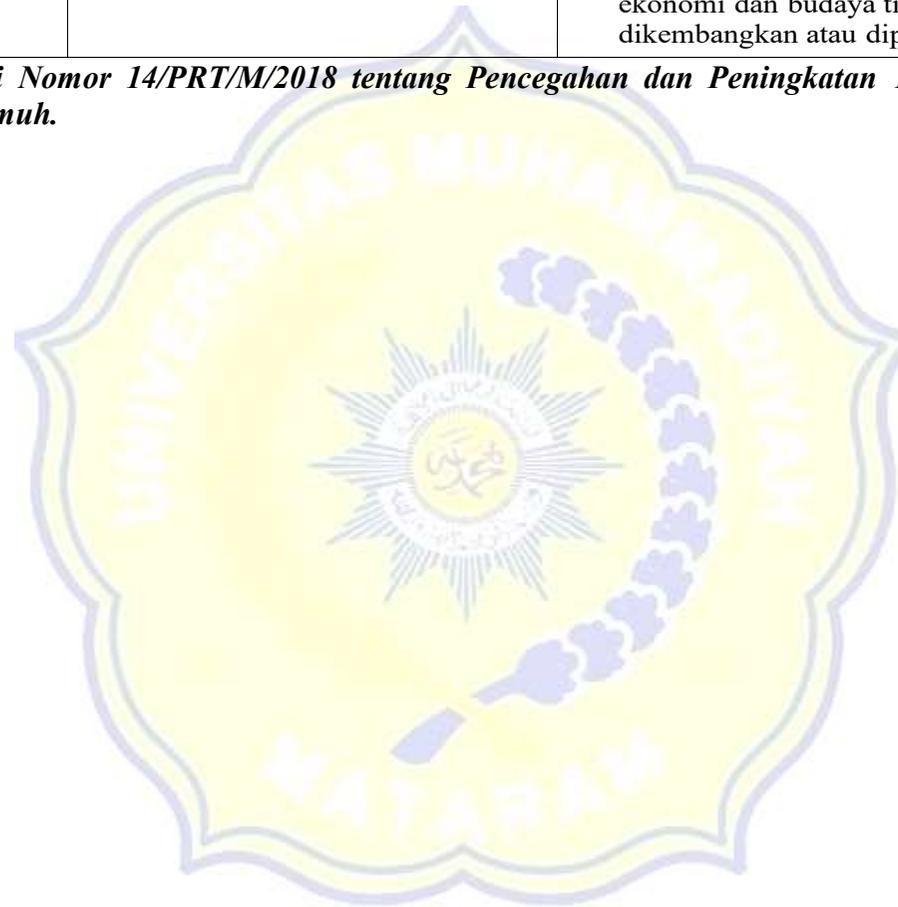
HAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala lingkungan; 3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan 4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 	3	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi			
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 	1				
			b. sistem pengelolaan persampahan	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. pewadahan dan pemilahan domestik; 2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengolahan lingkungan 		<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
						<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 	3	
<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 	1							
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; dan/atau 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan; 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 	5	Wawancara, Format			
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 	3	Isian, Peta RIS, Observasi			
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 	1				

	b.sarana proteksi kebakaran	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau 3. mobil tangga sesuai kebutuhan.	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran • 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran • 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
B. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN					
1. LEGALITAS LAHAN	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain 	(+)	Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain 	(-)	
	b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR 	(+)	Wawancara,

		Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR 	(-)	Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN					
1. PERTIMBANGAN LAIN	a. Nilai Strategis Lokasi	1. Perlu diperhatikan penempatan perumahan atau kawasan permukiman berdasarkan: 2. fungsi strategis kabupaten/kota; atau tidak adanya fungsi strategis kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota 	5	Wawancara, Format
	b. Kependudukan	1. Pertimbangan kepadatan penduduk di lokasi perumahan atau pemukiman, dengan klasifikasi sebagai berikut: 1. rendah, didefinisikan sebagai kepadatan penduduk kurang dari 150 jiwa per hektar; 2. sedang, didefinisikan sebagai kepadatan penduduk antara 151 sampai dengan 200 orang per hektar; 3. tinggi, didefinisikan sebagai kepadatan penduduk 201 sampai 400 orang per hektar; dan 4. sangat padat, yaitu kepadatan penduduk lebih dari 400 jiwa per hektar.	<ul style="list-style-type: none"> <u>Untuk Metropolitan & Kota Besar</u> Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha <u>Untuk Kota Sedang & Kota Kecil</u> Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha 	1	Isian, RTRW, RDTR, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha 	5	
			<ul style="list-style-type: none"> Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha 	3	
c. Kondisi Sosial,		<ul style="list-style-type: none"> Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk 	5	Wawancara, Format Isian, Observasi	

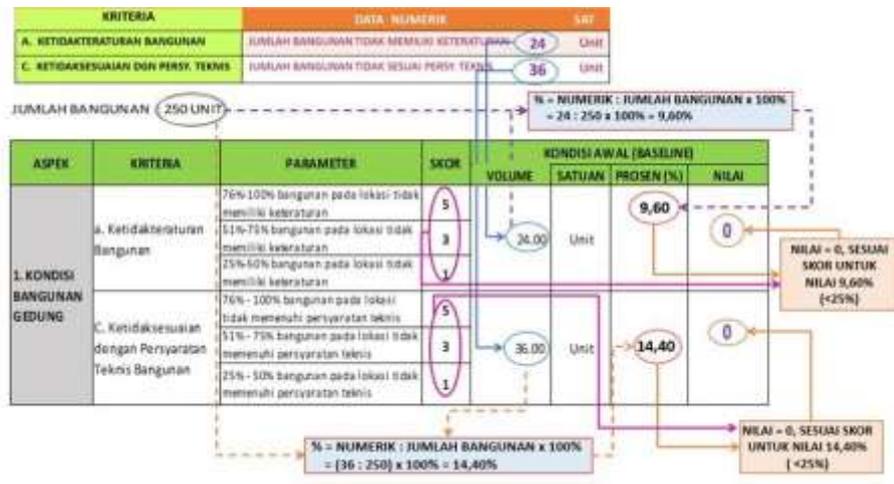
	Ekonomi,		<ul style="list-style-type: none"> • dikembangkan atau dipelihara • Lokasi tidak memiliki potensisosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara 	1	
--	----------	--	---	---	--

Sumber : Peraturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.



Berikut merupakan contoh penilaian numerik kriteria kekumuhan berdasarkan satuan kriteria:

1. Satuan Kriteria: Unit



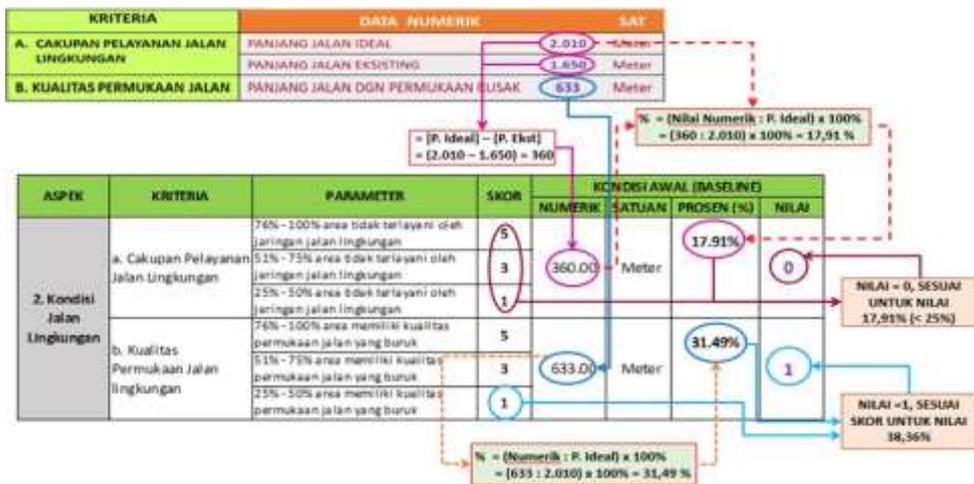
Gambar 3.1.

Contoh Perhitungan Kriteria Kumuh dengan Satuan Unit

Pada gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa data numerik jumlah bangunan yang tidak beraturan dan jumlah bangunan yang tidak memenuhi kriteria teknis masing-masing adalah 24 dan 36 satuan, maka angka tersebut dapat dimasukkan ke dalam Kolom volume.
- Formula yang telah ditetapkan digunakan untuk menghitung persentase kriteria bangunan tidak beraturan berdasarkan data numerik jumlah bangunan yang tidak beraturan dan jumlah bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis sebanyak 24 unit.
- Data jumlah bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis sebanyak 36 unit digunakan dalam perhitungan untuk menetapkan proporsi bangunan yang tidak memenuhi kriteria teknis bangunan.
- Angka 9,60% dan 14,40% dihasilkan dari masing-masing hasil perhitungan persentase. Nilai-nilai ini kemudian dimasukkan ke dalam kategorisasi faktor yang digunakan untuk menghasilkan skor. Kategorisasi parameter untuk nilai di bawah 25% meliputi 9,60% dan 14,40%, yang menghasilkan skor '0'.

2. Satuan Kriteria: Meter



Gambar 3.2.

Contoh Perhitungan Kriteria Kumuh dengan Satuan Meter

Pada gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Menurut angka, panjang jalan 2.010 meter sudah optimal. Total panjang jalan yang sedang dibangun adalah 1.650 meter, namun permukaan jalan yang dapat digunakan saat ini hanya 633 meter karena rusak. Angka-angka ini dapat digunakan untuk menghitung bagian dari pemeliharaan jalan yang dibutuhkan di suatu daerah tertentu; rumusnya adalah $360 * (\text{Panjang Jalan Ideal} - \text{Panjang Jalan Eksisting})$. Selanjutnya, angka yang mewakili kualitas permukaan jalan lingkungan dasar dimasukkan.
- Untuk mendapatkan persentase cakupan pelayanan jalan lingkungan, bagi angka numerik dengan panjang jalan ideal, kemudian hasilnya dikalikan 100% sehingga diperoleh nilai 17,91 persen.
- Persentase kualitas permukaan jalan lingkungan dapat dihitung sebagai berikut: pertama, kalikan 100% hasil pembagian panjang jalan sebenarnya dengan permukaan rusak dengan panjang jalan ideal. Ini menghasilkan nilai 31,49. Kualitas permukaan jalan lingkungan dinyatakan sebagai persentase, yang dapat ditemukan dengan membagi panjang jalan yang ideal dengan panjang jalan yang rusak.
- Kategorisasi parameter yang digunakan untuk menghitung skor memperhitungkan persentase jika memiliki nilai antara 17,91% dan 31,49%.

Jika Anda memasukkan 17,91% ke dalam klasifikasi parameter untuk nilai di bawah 25%, Anda akan mendapatkan skor '0'. Parameter diklasifikasikan sebagai "1" jika dan hanya jika nilainya lebih besar dari atau sama dengan 25%.

3. Satuan Kriteria: Ha



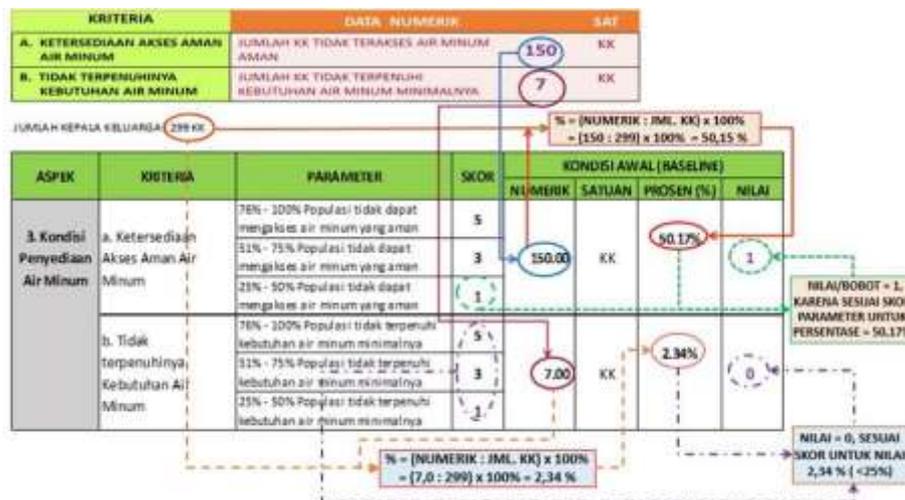
Gambar 3.3.

Contoh perhitungan kriteria kumuh dengan satuan Ha

Pada gambar diatas dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

- Diketahui data numerik luas area dengan kepadatan bangunan >200/250 (unit/Ha) adalah 0 Ha, luas kawasan yang terkena genangan yaitu 1 Ha.
- Untuk menghitung persentase kepadatan bangunan, pertama-tama ambil luasan yang diverifikasi dan bagi dengan angka luasan yang memiliki kepadatan bangunan lebih dari 200/250 (unit/Ha). Angka yang dihasilkan harus dikalikan dengan 100 persen untuk mendapatkan nilai 0%.
- Untuk menghitung persentase limpasan yang tidak dapat dialirkan, bagi angka tersebut dengan luas area kemudian bagi angka tersebut dengan 100 sehingga diperoleh hasil 16,23%.
- Hasil perhitungan persentase masing-masing menghasilkan nilai antara 0 sampai dengan 16,23%; persentase ini kemudian dimasukkan dalam kategorisasi parameter yang digunakan untuk menghasilkan skor. Pada kategorisasi parameter untuk nilai di bawah 25%, 0% dan 16,23% dianggap dapat diterima, yang memungkinkan untuk perhitungan skor '0'.

4. Satuan Kriteria: KK



Gambar3. 4.

Contoh Perhitungan Kriteria Kumuh dengan Satuan KK

Pada gambar diatas dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

- Data dapat ditempatkan ke dalam kolom numerik untuk kondisi awal, dan terungkap bahwa ada 150 keluarga yang tidak memiliki akses air minum bersih dan sedikitnya 7 rumah tangga yang kebutuhan air minumnya tidak terpenuhi. Sedikitnya 7 keluarga tidak memiliki akses air minum yang layak.
- Untuk menghitung proporsi rumah dengan air perpipaan, kita mengambil jumlah rumah tanpa air perpipaan dan membaginya dengan jumlah total orang yang tinggal di rumah tersebut. Nilai dapat dihitung dengan mengalikan angka akhir dengan 100. Persentase ini harus 50,17.
- Angka 2,34 persen diperoleh dengan membagi jumlah minimal air minum dengan jumlah kepala rumah tangga, kemudian dikalikan dengan 100. Nilai tersebut merupakan proporsi penduduk yang kebutuhan air minumnya tidak terpenuhi.
- Persentase yang dihitung adalah 50,17 persen dan 2,34 persen, sehingga nilai tersebut dimasukkan ke dalam klasifikasi kriteria yang digunakan untuk menentukan skor. Untuk mendapatkan skor '1' untuk nilai lebih dari 25%, masukkan nilai 50,17 persen dalam kategorisasi parameter; untuk

mendapatkan skor '0' untuk nilai kurang dari 25%, gunakan nilai 2,34%.

5. Menghitung Rata-Rata Kekumuhan Aspek (Sektoral)

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	150.00	KK	50.17%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	7.00	KK	2.34%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum					25.08%

$\text{= Jml Persentase Kriteria bernilai > 0 : Jml Kriteria Aspek}$
 $\text{= } 50,17\% : 2 = 25,08\%$

Kriteria bernilai > 0

Gambar 3.5.
Contoh Perhitungan Rata-Rata Kekumuhan Sektoral

Perhitungan Rata-rata kekumuhan aspek sektoral yaitu jumlah presentase kekumuhan yang bernilai lebih dari 26-100% dibagi jumlah kriteria di dalam aspek sektoral tersebut. Setelah diketahui semua skor setiap indikator kumuh, di jumlahkan, sehingga didapatkan tingkat kekumuhan di dalam kelurahan tersebut:

Tabel 3.5. Parameter Penilaian

Parameter	Nilai	Skor	Keterangan
Kualitas Baik	26-50%	1	Nilai 26-50% bermakna bahwa apabila salah satu atau lebih dari kedelapan variabel yakni kondisi bangunan gedung, kondisi status jalan lingkungan, suplai air, drainase, pengolahan limbah, pengolahan limbah padat, dan keamanan, serta kondisi lingkungan secara keseluruhan kebakaran dan pertimbangan lain sudah berdasarkan keteraturan dan memiliki kondisi yang baik. Maka tidak berpengaruh terhadap permukiman kumuh di Desa Gili Indah
Kualitas Buruk	51%-75%	3	Nilai 51-75% bermakna bahwa apabila salah satu atau lebih dari kedelapan variabel yakni kondisi bangunan gedung, kondisi keadaan jalan lingkungan, pasokan air, sistem drainase, sistem air limbah, sistem limbah padat, dan langkah-langkah keselamatan kebakaran dan pertimbangan lain sebagian sudah berdasarkan keteraturan dan memiliki kondisi yang kurang baik. Maka cukup berpengaruh terhadap permukiman kumuh di Desa Gili Indah
Kaulitas sangat buruk	76%-100%	5	Nilai 51-75% bermakna bahwa apabila salah satu atau lebih dari kedelapan variabel yakni kondisi bangunan gedung, kondisi kondisi jalan, kondisi pasokan air, kondisi

			<p>drainase, kondisi pengolahan limbah, kondisi pengolahan limbah padat, dan kondisi keamanan semua di lingkungan kebakaran dan pertimbangan lain sebagian tidak berdasarkan keteraturan dan memiliki kondisi yang buruk. Maka sangat berpengaruh terhadap permukiman kumuh di Desa Gili Indah</p>
berpengaruh	-	(-)	<p>Nilai negatif akan bermakna bahwa apabila variabel legalitas lahan tidak memiliki status kepemilikan lahan yang jelas, serta Menurut RTR, tidak ada tanah yang dipermasalahkan berada di dalam zona yang dikhususkan untuk tempat tinggal permanen manusia. maka akan berpengaruh terhadap tingginya permukiman kumuh di Desa Gili Indah</p>
Tidak Berpengaruh	-	(+)	<p>Nilai positif akan bermakna bahwa apabila variabel legalitas lahan memiliki status kepemilikan lahan yang jelas, Menurut RTR, tidak ada tanah yang dipermasalahkan berada di dalam zona yang dikhususkan untuk tempat tinggal permanen manusia. maka tidak berpengaruh terhadap tingginya permukiman kumuh di Desa Gili Indah</p>

Sumber : Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

3.6 Desain Survey

Adapun desain survei dalam penelitian Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Luas Permukiman Kumuh Di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara di bawah ini:

Tabel. 3.6 Desain Survey

Tujuan	Variabel	Sub variabel	Sub-Sub Variabel	Data yang Dibutuhkan	Sumber Data	Metode Pengambilan Data	Analisis	Output
Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Permukiman Kumuh Pada Kawasan Pariwisata Di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara	Kawasan Permukiman Kumuh (Santosa,2018)	Langsung (Faktor Fisik Bangunan)	Kondisi bangunan gedung	<ul style="list-style-type: none"> Data RDTR, melibatkan penentuan bentuk, ukuran, dan lokasi struktur dalam suatu zona, serta penampilannya; dan/atau Informasi tentang tata bangunan dan pengelolaan kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi penataan rukun tetangga, persil, 	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi	Survey Primer dan Sekunder	Analisis permukiman kumuh	Faktor permukiman kumuh di Desa Gili Indah

				<p>bangunan, elevasi dan elevasi lantai, ide identitas rukun tetangga, konsep orientasi rukun tetangga, dan muka jalan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • kepadatan bangunan tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; • kualitas konstruksi yang tidak sesuai dengan kriteria. • Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang lebih tinggi dari kriteria RDTR. • Koefisien Lantai Bangunan (KLB) • Alokasi Lokasi dan Intensitas Bangunan • Arsitektur 			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian Dampak Lingkungan • Rencana Tata Ruang dan Lingkungan (RTBL) • Konstruksi Bangunan Diatas Permukaan Tanah, Air, dan Prasarana/Fasilitas Umum • Konstruksi Bangunan Diatas Permukaan Tanah, Air, dan Prasarana/Fasilitas Umum • Pembangunan Gedung Diatas Permukaan Tanah 				
			Kondisi jalan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas permukaan jalan di lingkungan yang buruk 	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi,	Survey Primer dan Sekunder		

			<ul style="list-style-type: none"> • Akses air minum bersih tidak tersedia • Kebutuhan air minum minimum untuk setiap individu tidak terpenuhi • Data jumlah drainase yang tersedia • Drainase lingkungan tidak dapat mengalirkan air limpasan air hujan, menyebabkan genangan air terbentuk di daerah tersebut 	Observasi		
		Kondisi penyediaan air minum	<ul style="list-style-type: none"> • Standar konstruksi sistem drainase lingkungan 	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observas	Survey Primer dan Sekunder	

			Kondisi drainase lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pengolahan air limbah tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. 	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observas	Survey Primer dan Sekunder		
			Kondisi pengelolaan air limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi kriteria teknis • tidak memenuhi persyaratan teknis 	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observas	Survey Primer dan Sekunder		
			Kondisi pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan bahwa sistem pengelolaan limbah padat tidak memenuhi standar teknis. 	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observas	Survey Primer dan Sekunder		
			Kondisi proteksi kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah instalasi infrastruktur proteksi kebakaran • Jumlah total fasilitas proteksi 	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observas	Survey Primer dan Sekunder		

				kebakaran			
			Legalitas Lahan	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian atau seluruh tempat tidak memiliki status penguasaan tanah yang jelas, baik milik sendiri maupun milik pihak lain. Semua lokasi memiliki status penguasaan lahan yang jelas, baik milik sendiri maupun milik pihak lain. 		Survey Primer dan Sekunder	
			Pertimbangan Lain	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha 	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observas	Survey Primer dan Sekunder	

				<ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 – 200 Jiwa/Ha • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha • Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara • Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara 			
	Tidak Langsung (faktor-faktor yang secara langsung	Faktor Ekonomi Masyarakat	Pendapatan Masyarakat Desa Gili Indah	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observas	Survey Primer dan Sekunder		

		tidak berhubungan dengan kekumuhan)	Faktor Sosial Budaya Masyarakat	Kondisi social dan Budaya Masyarakat Desa Gili Indah	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observas	Survey Primer dan Sekunder		
Kawasan Pariwisata	Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Petunjuk arah, • bandara, terminal, • waktu yang dibutuhkan, • biaya perjalanan, • frekuensi transportasi menuju lokasi wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Petunjuk arah, • bandara, terminal, • waktu yang dibutuhkan, • biaya perjalanan, • frekuensi transportasi menuju lokasi wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Petunjuk arah, • bandara, terminal, • waktu yang dibutuhkan, • biaya perjalanan, • frekuensi transportasi menuju lokasi wisata 	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observas	Survey Primer dan Sekunder	Analsis Deskriptif	
	obyek-obyek menarik	<ul style="list-style-type: none"> • Objek wisata alam, • seni budaya, • legenda, • makanan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek wisata alam, • seni budaya, • legenda, • makanan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek wisata alam, • seni budaya, • legenda, • makanan lokal 	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observas	Survey Primer dan Sekunder		
	Keamanan	Keamanan di desa tersebut terjamin	Keamanan di desa tersebut terjamin	Keamanan di desa tersebut terjamin	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observas	Survey Primer dan Sekunder		
	akomodasi	• telekomunikasi,	• telekomunikasi,	• telekomunikasi,	Wawancara,	Survey		

			• tenaga kerja yang memadai	• tenaga kerja yang memadai	Format Isian, Peta Lokasi, Observas	Primer dan Sekunder		
--	--	--	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	---------------------	--	--

Sumber: Hasil olahan peneliti 202

